

SATU DASAWARSA PERTAMA PERJALANAN PDIN-LIPI

Siti Nuraini

Pustakawan PD99-LIPI

Pendahuluan

Kita telah membaca tentang satu dasawarsa menjelang kelahiran PDIN tulisan Kepala Pusat Dokumentasi Informasi Ilmiah (PDII) dalam rangka 31 tahun PDII-LIPI yang dimuat dalam Baca vol.XXI no. 1-2 Juni 1996 sebagai topik utama.

Tulisan ini bermaksud untuk melanjutkan tulisan tersebut di atas yaitu perkembangan PDIN dari awal berdirinya sampai berusia sepuluh tahun. Kemudian perkembangan pada sepuluh tahun berikutnya diharapkan dapat dimuat pula dalam majalah BACA yang terbit mendatang.

Mudah-mudahan sebelum menginjak usia yang ke 40 dapat diterbitkannya suatu monografi yang utuh tentang PDII-LIPI kelak.

Seperti halnya pada terbitan terdahulu informasi diperoleh terutama dari rekaman peristiwa dalam terbitan berkala Berita MIPI yang kemudian menjadi Berita LIPI (1965-1975).

Dengan Keputusan Menteri Urusan Research Nasional no. 107/M/Kpts/Str/65. Bagian Dokumentasi MIPI menjadi Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional (PDIN), menempati gedung perumahan sebagai kantor seluas 1.008 m2 di Jalan Raden Saleh no. 43, Jakarta Pusat.

Pada awalnya PDIN dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh Asisten Direktur dan seorang Sekretaris. Kegiatan-kegiatan yang masih sederhana pada waktu itu dilakukan oleh 3 Pusat yaitu: Pusat Bibliografi, Pusat Perpustakaan dan Pusat Reproduksi

Rekaman Peristiwa

Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional (PDIN) diresmikan berdirinya bulan Juni 1965 dengan tugas memberikan penerangan dan penyebaran ilmu pengetahuan dengan cara menyediakan bahan literatur yang diperlukan oleh karyawan riset dan karyawan lainnya yang bekerja dalam lembaga-lembaga ilmiah dan suatu industri yang memerlukan bahan-bahan literatur ilmiah.

Berita MIPI vol. 10, 1966 no. 1-2 p. 1

1966 Pada tanggal 23 Mei 1966, Indijah salah seorang dari ketiga tenaga pada PDIN dikirim keluar negeri (Zultanawar sedang menyelesaikan Master Degree bidang dokumentasi dan perpustakaan, Nurmatias ditugaskan untuk mempelajari soal reproduksi).

Berita MIPI vol. 10, 1966 no. 3-4 p. 117

1967 Sejak bulan Maret 1967, PDIN-MIPI dibantu oleh seorang ahli dari Unesco yaitu Michel J.E. O'Halloran dalam teknik informasi ilmiah selama 2 tahun. Beliau juga ahli dalam fotografi dan printing. Pernah membantu merencanakan pendirian pusat-pusat dokumentasi ilmiah di Pakistan dan Muangthai.

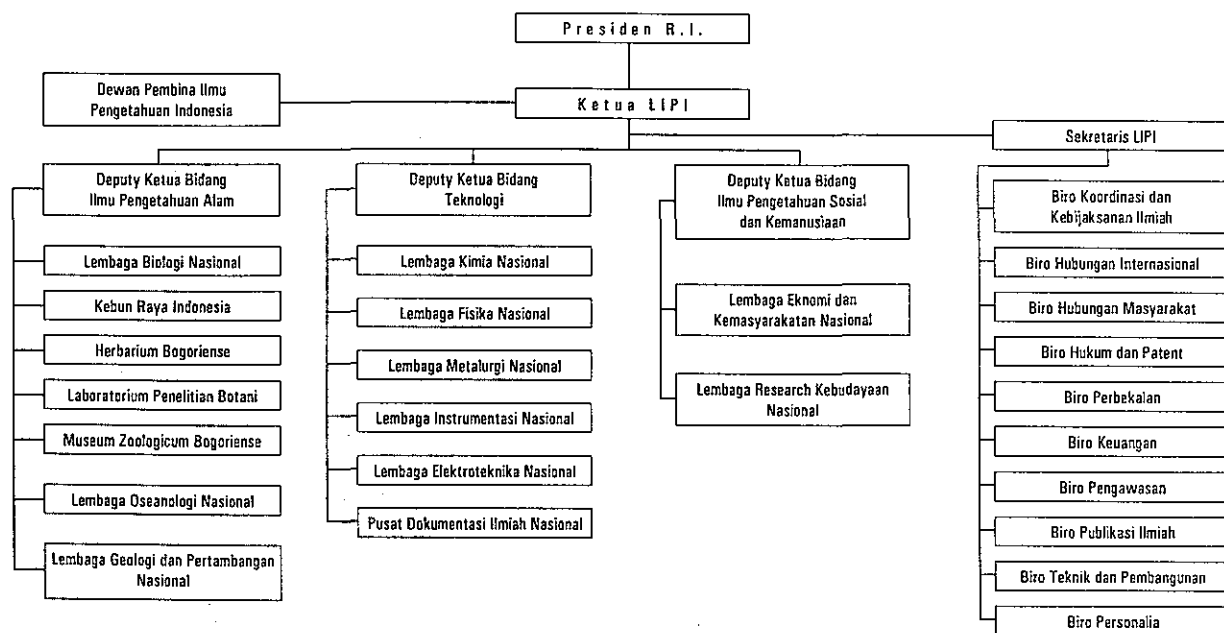
Berita MIPI vol. 11, 1967 no. 1-2 p. 60

PDIN mendapat jatah devisa untuk berlangganan majalah luar negeri. Kemudian PDIN menerbitkan Daftar majalah-majalah ilmiah yang diterima oleh lembaga-lembaga MIPI sebagai langganan dalam tahun 1966. Karyawan di dalam dan di luar MIPI dapat melanggan daftar isi majalah yang dipilihnya. Hal ini disebut melanggan "Informasi Kilat". Saat itu artikel lengkap dapat dikopi, untuk lingkungan didalam MIPI perhalaman Rp. 2,50 dan di luar MIPI Rp. 10.

Berita MIPI vol. 11, 1967 no. 1-2 p. 80

Induk lembaga dari PDIN mengalami perubahan. MIPI dan Lembaga Research Nasional dibubarkan serta membentuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara RI no. 18/B/1967.

Bagan Struktur Organisasi LIPI ditetapkan dengan Keppres.no. 128 tahun 1967 dan PDIN berada dibawah Deputy Ketua Bidang Teknologi.



Pada tahun 1967 Indonesia pertama kali mendapat kesempatan hadir pada konperensi Federation Internationale de Documentation (FID). Pada tahun ini pula pertama kali konperensi berlangsung di benua Asia yaitu di Tokyo. Berikut laporan Luwarsih Pringgoadisuryo salah seorang yang menghadiri konperensi tsb. mewakili keanggotaan nasional.

FEDERATION INTERNATIONALE DE DOCUMENTATION (FID) DAN KONPERENSI KE-33 DI TOKYO

Oleh
Luwarsih Pringgoadisurjo

Tulisan ini terutama bertujuan melaporkan hasil konperensi FID ke-33 yang berlangsung di Tokyo antara tanggal 12-22 September 1967, tapi tak ada jeleknya bila kami disini menguraikan sedikit tentang riwayat berdirinya FID bagi mereka yang belum kenal badan international tersebut.

FID didirikan pada tahun 1895 oleh Henri La Fontaine dan Paul Otlet di Brussel dengan nama "Institut International de Bibliographie".

Tujuan mendirikan IIB adalah karena hasrat mereka menyusun bibliografi dunia yang lengkap pada kartu². Untuk tujuan ini mereka perlu mengklasir dokumen-dokumen secara universal. Mereka memilih mempergunakan sistim klasifikasi Melvil Dewey yang kemudian diperluas menjadi Universal Decimal Classification.

Usaha lain yang juga termasuk jasa dua sarjana tersebut ialah ide menyeragamkan peraturan-peraturan mengkatalog dokumen. Mereka juga mengusulkan mempergunakan mikrofilm (penemuan Dagron pada tahun 1870) untuk memproduksi dokumen-dokumen di perpustakaan.

IIB mula-mula adalah perkumpulan perorangan yang mendapat sokongan dari Pemerintah Belgia

pada waktu itu. Dalam riwayat hidupnya IIB berkali-kali mengadakan konperensi dan pada konperensinya pada tahun 1931 pengertian "dokumentasi" diterima oleh IIB. Sejak itu IIB berganti nama menjadi Institut Internationale de Documentation. IID mengartikan "dokumentasi" sebagai mengumpulkan, mengklasir, menyebarkan dokumen dalam segala macam bentuknya. Dalam arti yang lebih khusus "dokumentasi berarti mencari metode-metode menyampaikan isi suatu dokumen kepada pemakai. Menurut IID, tugas lain pustakawan yaitu terutama mengurus koleksi buku, majalah dan lain-lain penerbitan pada perpustakaan.

Setelah mengalami pasang surut dalam usaha memenuhi tujuannya, atas usul F. Donker Duyvis (Belanda) perkumpulan perorangan ini kemudian pada tahun 1924 menjadi suatu federasi beranggotakan lembaga-lembaga khusus, nasional dan international. Pada 1938 lahirlah Federation International de Documentation (FID)

Sesuai dengan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah tentu diikuti oleh terbitnya aneka ragam dokumen-dokumen, maka FID berusaha menyusun program kerjanya sesuai dengan tantangan-tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam lapangan dokumentasi.

Program kerja FID dalam garis besar antara lain mencakup :

- a. mengajak badan-badan nasional dan international bekerja sama dalam lapangan dokumentasi.
- b. dalam tingkat international mempelajari, mengorganisasi melaksanakan praktek-praktek dokumentasi dalam semua bentuknya.
- c. meletakkan dasar-dasar dokumentasi serta menuntun pelaksanaan dokumentasi pada badan-badan yang tergabung dalam keanggotaan FID.
- d. mengadakan pertukaran informasi dan pengalaman antara anggota-anggotanya.

- e. mendukung konferensi-konferensi internasional yang membahas soal dokumentasi.
- f. menerbitkan, menjual menyebarkan majalah dan lain-lain penerbitan yang membahas soal dokumentasi.
- g. mengadakan kerjasama internasional dalam lapangan dokumentasi.
- h. mempelajari pendidikan dan latihan dokumentasi dan lain-lain lapangan khusus yang bertahan dengan dokumentasi.
- i. bertindak mengerjakan lain-lain hal bila dipandang perlu untuk dapat mencapai program-program tersebut diatas.

Untuk tujuan memenuhi programnya FID bekerja dengan cara membentuk panitia-panitia studi yang bertugas mempelajari aspek-aspek dokumentasi dalam tingkat nasional dan internasional serta menyarankan pemecahannya. Mendukung pendapat-pendapat yang berguna serta mendukung hubungan kerja antara ahli-ahli dokumentasi. Anggota panitia dipilih antara anggota-anggota nasional dan perorangan yang telah menunjukkan keunggulan bekerja dalam lapangan dokumentasi. Panitia diberi kesempatan untuk bekerja 4 tahun dan ia bertanggungjawab kepada FID dan Congress. Pada waktu ini FID mempunyai panitia studi sebagai berikut:

- FID/RI "Research on the theoretical basis of information"
 - FID/CR "Classification Research".
 - FID/TM "Theory of Machine Techniques and System".
 - FID/OM "Operational Machine Techniques and System".
 - FID/LD "Linguistics in Documentation".
 - FID/TI "Technical Information for Industry"
 - FID/TD "Training of Documentalists".
- Panitia khusus:
FID/DC "Developing Countries".

Sejak FID masih bernama IIB badan ini menaruh perhatian khusus pada aspek klasifikasi ilmu pengetahuan. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula klasifikasi selalu

mengalami perubahan dan perbaikan. Dapat dikatakan dari semua panitia FID, panitia klasifikasi UDC paling banyak memberikan sumbangan pada dunia dokumentasi.

Panitia FID/CCC "Central Classification Committees" mempunyai panitia yang bertugas pada waktu tertentu merevisi UDC mempunyai panitia-panitia khusus yang bertugas mengawasi dan bertanggung jawab atas revisi-revisi UDC. Pada waktu ini terdapat :

- FID/C 1/2 "Philosophy. Religion"
- FID/C "Social sciences"
- FID/C 53 "Physics"
- FID/C 54 and 66 "Chemical sciences"
- FID/C 55 "Earth sciences"
- FID/C 57/59 "Biology, Botany, Zoology"
- FID/C 61 "Medicine"
- FID/C 620. 1 "Materials testing"
- FID/C 621.3 "Electrical engineering"
- FID/C 62 I/C 7/9 "Workshop practice (Mechanische Technologie)"
- FID/C 623 "Military and naval engineering"
- FID/C 625 "Railway engineering"
- FID/C 628 "Public health engineering"
- FID/C 629 "Transport engineering"
- FID/C 63 "Agriculture"
- FID/C 65 "Management"
- FID/C 669 "Metallurgy"
- FID/C 676 "Plup and Paper"
- FID/C 677 "Textiles"

Bagi mereka yang mengkhususkan diri pada salah satu bidang tersebut di atas, sudah tentu ada baiknya mengikuti revisi-revisi yang dihasilkan oleh panitia-panitia tersebut.

Keanggotaan Indonesia pada FID

Indonesia tercatat sebagai anggota nasional FID sejak 1950, pada waktu itu diwakili oleh Organization for Scientific Research (OSR) dan kemudian pada 1956, keanggotaan diwakili oleh MIPI. Pada 1965 Bibliotheca Bogoriensis tercatat sebagai Associate Member.

Konperensi FID ke-33 di Tokyo

Patut dilaporkan bahwa Indonesia baru pertama kali ini mendapat kesempatan hadir pada konperensi FID. Kami sendiri mendapat tugas untuk mewakili keanggotaan nasional sedang Nj.P. Sahertian Bakhoven datang sebagai associate member. Konperensi yang baru-baru ini berlangsung di Tokyo merupakan suatu peristiwa dalam riwayat FID, karena baru sekali ini konperensi berlangsung di benua Asia. Peserta konperensi dapat menarik kesimpulan bahwa di Jepang, baik pemerintah maupun badan-badan industri swasta sudah mengakui pentingnya fungsi dokumentasi untuk mensukseskan research, serta menyadari bahwa pada akhirnya berarti meningkatkan kehidupan bangsanya. Kiranya tak asing lagi kenyataan kesanggupan Jepang untuk mengawinkan penemuan-penemuan dari luar negeri dengan penemuan-penemuan sendiri. Untuk keperluan ini mereka tidak ragu-ragu mengeluarkan anggaran besar untuk research. Itu pula sebabnya mengapa pada kebanyakan pusat-pusat industri terdapat suatu bagian dokumentasi atau lazim disebut pusat informasi ilmiah, karena industri-industri menginsyafi bahwa informasi tentang penemuan-penemuan dalam dunia Internasional maupun didalam negeri perlu dikuasai sebelum suatu penemuan baru dapat diterapkan di Jepang.

Tanda lain yang menunjukkan industri Jepang mengakui pentingnya peranan dokumentasi ialah dibuktikan dari deretan daftar nama-nama industri yang telah menanggung segi keuangan untuk menyelenggarakan konperensi FID ke-33. Lebih dari 55 perusahaan Industri, dari Ajinomoto Co, Japan Iron and Steel Federation sampai ke Tokyo Electric Power Co, dan masih banyak lagi lainnya, mewujudkan terselenggaranya konperensi.

Peserta konperensi sendiri dapat menyaksikan Technical Research Institute of the Japan National Railways, Electrical Communication Laboratory, Nippon Telegraph and Telephone

Public Corporation, Cannon Camera Co, dan Nippon Electric Co, masing-masing mempunyai pusat dokumentasinya atau sedikitnya suatu perpustakaan khusus yang dapat menjamin pegawainya memperoleh informasi untuk kepentingan pekerjaan dalam bidang pengkhususan masing-masing.

Peserta juga mengunjungi Japan Information Center of Science and Technology (JICST) suatu badan pemerintah yang merupakan bagian dari Science and Technology Agency, langsung ada dibawah Kantor Perdana Menteri.

Sekedar gambaran tentang usaha JICST untuk memenuhi fungsinya sebagai pusat informasi ilmiah dan teknologi dapat dicerminkan dari deretan penerbitan-penerbitan mereka. Current Biography on Science and Technology, dengan seri-seri:

Mechanical Engineering 2x sebulan

Electrical Engineering 2x sebulan

Chemistry and Chemical Industry 3x satu tahun

Earth Sciences, Mining, and Metallurgy 2x sebulan

Civil Engineering and Architecture 2x sebulan

Pure and Applied Physics 2 sebulan

Atomic Energy (Isotopes and Radiation Chemistry ser.) bulanan

Management Science bulanan

Complete Chemistry Abstracts of Japan bulanan (khusus mencakup karangan-karangan dan patent Jepang)

Foreign Patent News mingguan

Documentation and Information Technical

Information for Small Industries 2 bulanan

Technical Information for small Industries 2 bulanan

Technical Highlights from Overseas bulanan

General Index to Japan Chemical Abstracts 1941-1955. Annual Index of Japanese Patents.

Dilaporkan bahwa hanya untuk keperluan proses informasi JICST menempatkan 100 sarjana ilmu eksakta atau teknologi dalam bagian ini. Untuk keperluan penerbitan-penerbitan intisari (abstracts) JICST mempunyai panel 3000 sarjana

dan teknolog yang sewaktu-waktu dapat mereka pergunakan tenaganya.

Kiranya keterangan diatas cukup memberi gambaran pentingnya penerbitan untuk pengumpulan dan kemudian penyebaran informasi.

Sesuai dengan kemajuan-kemajuan teknologi maka tidak mengherankan bahwa pada kebanyakan pusat informasi yang kami saksikan, proses informasi dikerjakan secara mekanis dengan komputer.

Rasanya tidak perlu untuk menyebutkan semua judul-judul kertas kerja yang dibacakan selama konperensi Bagi mereka yang berminat membaca kertas-kertas karya konperensi dapat menghubungi Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional LIPI. Namun demikian tak ada salahnya kami sebutkan disini seksi-seksi pembagian konperensi.

Ia State of the Art Report

Ib Research Tool in Information for Science

Ic Scientist and Information: Scientific Papers as a Source of Information.

II Education and Training

IIIa Trends in Documentation

IIIb Information Systems (1)

IIIc Retrieval Systems (1)

IIId Indexing and Abstracting (1)

IIIe Indexing and Abstracting (2)

IIIf Retrieval Systems (2)

IIIg Thesaurus

IIIh Classification

Dari semua hasil karya yang diajukan dalam seksi manapun dapat diambil kesimpulan bahwa :

- 1) Dokumentasi sudah diakui menjadi bagian integral dari proses research. Bahwa dokumen adalah mutlak untuk mentransfer pendapat-pendapat. Tantangan bagi dokumentalis ialah: mencari teknik-teknik baru yang lebih efektif untuk mentransfer informasi-

informasi kepada mereka yang memerlukan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

- 2) Analisa informasi, seperti beaya dan tenaga yang diperlukan untuk mentransfer informasi.
- 3) Pentingnya pendidikan kader-kader dokumentalis, sesuai dengan tantangan ilmiah.

Konperensi Regional Asia

Suatu acara istimewa selama konperensi ialah disediakannya program Konperensi Regional Asia khusus untuk membicarakan soal-soal dokumentasi yang khusus, yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang. Laporan-laporan dari negara-negara Asia peserta konperensi menunjukkan bahwa pada negara-negara ini terkecuali Jepang masih harus memperjuangkan soal primair seperti 1) kesukaran memperoleh tenaga-tenaga dokumentalis yang berpengalaman 2) soal bagaimana meyakinkan pemerintah masing-masing bahwa dokumentasi harus diakui sebagai bagian integral dari research, 3) menarik masyarakat pada umumnya, sarjana research dan teknologi pada khususnya, mempergunakan fasilitas-fasilitas informasi literatur yang sudah tersedia sebelum mulai suatu projek.

Kiranya tak perlu diterangkan perlunya pertukaran pikiran antara peserta Konperensi Regional Asia mengenai soal-soal yang khas yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang. Karena keperluan tersebut konperensi memutuskan membentuk panitia kerja yang bertugas mempelajari perlunya FID khusus membentuk "Panitia Asia". Dalam panitia kerja duduk wakil dari India, Jepang, Muangthai, dan URSS. Pada konperensi yang berlangsung di Moskow bulan September 1968 panitia akan mengusulkan ruang lingkup kerja dari Panitia Asia, untuk mendapat pengesahan dari anggota-anggota.

Panitia Nasional FID

Dilaporkan diatas bahwa untuk program kerjanya, FID membetuk panitia-panitia dengan tugas mempelajari aspek-aspek khusus dari dokumentasi, serta menyarankan kepada FID untuk mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu. Kebanyakan dari anggota-anggota nasional biasanya juga mempunyai panitia nasional FID dengan tugas mempelajari aspek-aspek dokumentasi menurut kebutuhan nasional. Kami berpendapat bahwa sudah waktunya Indonesia memikirkan kemungkinan membentuk panitia nasional FID. Suatu panitia yang aktif akan dapat menyumbangkan:

- 1) memupuk kesadaran pentingnya dokumentasi di tanah air.
- 2) akan banyak sekali membantu Indonesia keluar sebagai anggota aktif dari FID.

Beberapa contoh yang dapat disumbangkan oleh panitia nasional umpamanya ialah:

FID/C/1.2 "Philosophy, Religion" mempelajari, menyarankan perluasan klasifikasi agama Islam berdasarkan ilmiah menurut pendapat Indonesia.

FID/3 Social Sciences menyarankan perbaikan, perluasan klasifikasi geografi, sejarah Indonesia.

FID/TD menyusun silabus untuk training maupun pendidikan dokumentalis menurut kebutuhan nasional.

FID/TI "Technical Information for Industry" memahami kebutuhan industri akan informasi dengan tujuan meningkatkan produksi.

Perlu kami sampaikan disini bahwa panitia nasional ini nanti bukanlah menjadi monopoli dokumentalis-dokumentalis. Sarjana dalam macam-macam bidang harus diikuti sertakan, tergantung dari bidang yang akan menjadi ruang lingkup panitia. Panitia nasional FID bertanggungjawab kepada LIPI yang mewakili Indonesia sebagai anggota.

1968 Dalam rangka bantuan Rencana Colombo, pada tanggal 2 Mei 1968 telah berangkat ke Australia Sdr. Hernandono, staf PDIN. Sdr. Hernandono mengikuti "practical training" yang di selenggarakan oleh CSIRO selama 8 bulan,

yang bersangkutan mempelajari system Union Catalogue (Katalog Induk).

Proyek USAID Science Book Program

Maksud diselenggarakannya proyek USAID Science Book Program adalah untuk mengatasi kegagalan masuknya literatur ilmiah terutama terbitan Amerika Serikat.

Pada pesanan periode I (thn. 1964/1965) berjumlah 2.234 judul buku seharga US\$ 35,261.23 dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada pesanan periode II (thn. 1966/1977) dipesan 1.781 judul buku seharga US\$ 32,331.91 termasuk buku-buku dalam bidang ilmu sosial dan kebudayaan.

Bagi lembaga peserta proyek ini dituntut syarat-syarat sbb. :

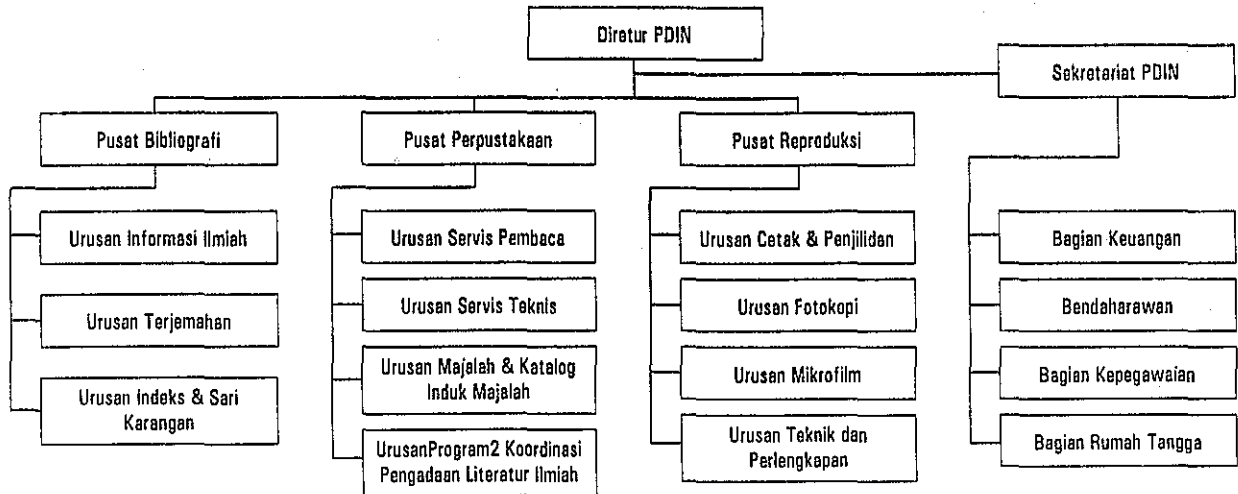
1. Menyelenggarakan penelitian dan memiliki publikasi untuk menerbitkan hasil-hasil penelitian
2. Memiliki perpustakaan, literatur diatur dengan sistim yang baik, pinjam meminjam dengan arti bahwa buku tidak akan terbatas pemakaiannya bagi lingkungan sendiri
3. Bersedia membayar 10% dari harga buku-buku yang dipesan menurut nilai mata uang yang ditetapkan berlaku untuk proyek ini (dalam arti lembaga memiliki anggaran untuk perpustakaan)
4. Dalam proyek ini tidak diizinkan adanya duplikasi pemesanan yang tidak beralasan, dengan maksud agar dapat diimpor jumlah judul buku sebanyak-banyaknya.

Untuk tahun 1968 PDIN berhasil mengusahakan jatah buku yang meliputi harga US\$ 60,000 untuk 2.249 judul yang merupakan pesanan dari 31 instansi/lembaga di luar lingkungan LIPI. Science Book Program ini merupakan salah satu bantuan yang diberikan oleh National Academy of Sciences untuk memenuhi kebutuhan buku-buku ilmiah di Indonesia. Pesanan buku melalui Science Book Program ini dapat diajukan oleh setiap instansi/lembaga didalam maupun diluar

lingkungan LIPI. Dan sejak tahun 1964 sudah mencapai 5.690 judul buku yang diterima MIPI/LIPI

Berita LIPI vol. 12, 1968 no.2 p.30

Dalam bagan struktur organisasi LIPI, PDIN berada dibawah Deputy Ketua Bidang teknologi bersama dengan lima lembaga LIPI lainnya. Berdasarkan SK Ketua LIPI no.227/Kep./D.5/1968 tanggal 20 Nopember 1968 bagan struktur organisasi PDIN sbb. :



1969 Dalam rangka tugas PDIN membantu usaha rehabilitasi perpustakaan-perpustakaan ilmiah telah diselenggarakan "Kursus Perpustakaan dan Dokumentasi" khusus bagi lembaga-lembaga penelitian di Indonesia. Kursus yang pertama selama 10 minggu dilaksanakan tanggal 29 September sampai 5 Desember 1969; dan yang kedua dimulai tanggal 6 April 1970 dan berlangsung selama 12 minggu. Pada minggu-minggu terakhir diadakan peninjauan ke perpustakaan di Jakarta, Bogor (kursus I), dan beberapa peninjauan disertai pemutaran film.

Peserta kursus ini terdiri dari karyawan-karyawan:

Kursus I:

- Balai Penelitian Gizi, Bogor
- Direktorat Geologi, Bandung
- Direktorat Tata Kota dan Daerah, Jakarta
- Lembaga Bahasa Nasional, Jakarta
- Lembaga Kimia Nasional, Bandung
- Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan, Bandung
- Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional,

Jakarta

- Proyek Pembangunan Prasarana Penelitian Maritim, Jakarta
- Pusat Penelitian Pasar Jum'at-BATAN, Jakarta
- Pusat Reaktor Atom, Bandung

Kursus II :

- Balai Penelitian Perkebunan, Bogor
- Balai Penelitian Perkebunan, Jember
- Building Information Center, Jakarta
- Lembaga Farmasi Nasional, Jakarta
- Lembaga Masalah Ketenagaan, Jakarta
- Lembaga Penelitian Hortikultura, Jakarta
- Lembaga Penelitian Peternakan, Bogor
- Lembaga Penelitian Tanah, Bogor
- Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan, Bandung
- Lembaga Pusat Penelitian Perkebunan, Bogor
- Lembaga Pusat Penelitian Perkebunan, Kalimantan

Pada tanggal 5 Desember 1969 di Jakarta dibentuk "Himpunan Pustakawan Khusus Indonesia" (HPCI) yang diprakasai para pengikut kursus perpustakaan dan dokumentasi

angkatan I yang diselenggarakan oleh PDIN-LIPI tersebut diatas. Tujuan Himpunan adalah: 1. membina perkembangan perpustakaan khusus di Indonesia; 2. memupuk hubungan antar anggota.

Susunan badan pimpinan Himpunan adalah sebagai berikut:

Ketua : Hermana (Balai Penelitian Gizi, Unit Semboja, Bogor)

Wakil Ketua : Luwarsih Pringgoadisurjo (PDIN-LIPI, Jakarta)

Bendahara : Sutrisno (Direktorat Tata Kota dan Daerah, Jakarta)

Sekretaris : Hernandono (PDIN-LIPI, Jakarta)

Hubungan Masyarakat: Halina Hambali (Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional, Jakarta)

Himpunan telah berhasil mengeluarkan/menerbitkan 'Majalah Himpunan Pustakawan-Khusus Indonesia' yang dimulai dengan nomor pengenalan/percobaan pada akhir bulan Maret 1970.

Berita LIPI vol. 14, 1970 no. 1-2 p 51-52

1970 Pada tanggal 22 Mei 1970 ditetapkan di Jakarta dengan Keputusan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.91/Kep./H./70 tentang Pengiriman setiap penerbitan kepada Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional (PDIN)-LIPI Kewajiban ini ditujukan kepada Lembaga-lembaga dan Unit-unit Administrasi dalam lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk mengirimkan 1 (satu) kopi dari setiap penerbitan dan atau laporan umum yang dikeluarkan oleh lembaga/unit yang bersangkutan.

Sebagai kelanjutan dari sidang umum UNESCO ke-15 di Paris tahun 1968, Jepang diminta untuk menyelenggarakan training dalam bidang dokumentasi untuk daerah Asia. Maka training course tsb. dilaksanakan tanggal 20 Juli-21

Agustus 1970 oleh Japanese National Commission for Unesco. Andrini Martono sebagai salah seorang peserta dari kursus tsb. melaporkan sebagai berikut :

LAPORAN TRAINING COURSE IN DOCUMENTATION TECHNIQUE IN ASIA TOKYO, 20 JULI - 21 AGUSTUS 1970

Oleh

Andrini Martono

Sebagai kelanjutan dari sidang umum UNESCO ke-15 (Paris 1968) untuk membantu training dalam bidang dokumentasi, Jepang telah diminta untuk menyelenggarakan training untuk daerah Asia. Dalam hubungan ini, "Japanese National Commission for UNESCO" dalam kerjasama dengan UNESCO telah mengundang 2 orang peserta dari 10 negara Asia untuk mengikuti training course yang pertama ini. Usaha ini mendapat sambutan yang hangat dengan hadirnya 18 peserta dari 9 negara Asia (Thailand tidak mengirimkan peserta).

Pada umumnya kursus ini telah berjalan dengan hasil yang memuaskan, dan telah banyak menambah wawasan peserta, dalam cara-cara dan teknik dokumentasi yang baru. Karena kursus ini merapikan orientasi/introduksi dari kemajuan teknik dokumentasi, dalam waktu sesingkat 5 minggu ini tentu tidak dapat diperoleh pengetahuan yang mendalam, yang mana diperlukan studi yang khusus.

Ceramah yang diberikan oleh ahli-ahli dalam masing-masing bidang bersifat lanjut (advanced), dan karena kesukaran bahasa kadang-kadang harus digunakan penterjemah, hingga mudah ditangkap.

Sebagaimana umumnya dihadapi dalam penyelenggaraan suatu training, sukar didapatkan tingkatan yang sama dari pesertanya, sehingga daya tangkapnya kurang seimbang.

Selain teori juga diadakan praktek atau demonstrasi dalam bidang dokumentasi, repro-

duksi maupun information retrieval dengan computer.

Dari peninjauan-peninjauan ternyata bahwa perusahaan-perusahaan besar sudah banyak yang mempergunakan computer dalam pengolahan informasi, dan pengelolaan dokumentasinya sangat luas. Peralatan elektronik yang sangat maju telah digunakan dalam penyaluran data melalui telekomunikasi. Universitas-universitas dan lembaga negara pada umumnya belum menggunakan pengolahan dokumen dengan komputer, tetapi banyak yang sedang dalam perencanaan. Kesulitan dalam pengelolaan dokumentasinya adalah karena sebagian besar literatur adalah dalam bahasa dan huruf Jepang, hingga bibliografi disusun dalam huruf Romawi maupun huruf Jepang.

Kesimpulan

Pada hari terakhir telah diadakan diskusi diantara peserta, dipimpin oleh Mr. B. Guha dari Indian National Documentation Center. Dalam diskusi didapat kesimpulan bahwa training yang diselenggarakan telah membawa banyak manfaat bagi peserta negara-negara Asia. Karena Jepang sangat maju dalam bidang dokumentasi dan mekanisasi, maka negara ini adalah tepat sebagai tempat penyelenggaraan training. Diharapkan bahwa training macam ini dapat diperluas kepada lebih banyak karyawan perpustakaan dan dokumentasi dikemudian hari. Disamping training yang bersifat umum, juga diharapkan penyelenggarakan training yang bersifat khusus misalnya reprografi, mekanisasi, penelusuran informasi, indexing dan sebagainya. Selain mengenai penyelenggaraan training untuk negara-negara Asia, juga dibahas mengenai rencana "Regional Information Center" di Bangkok, yang dikemukakan oleh Mr. J. Mc Divitt, Unesco Field Science Officer Jakarta, yang datang memberikan penjelasan pada peserta training. Untuk terselenggaranya rencana tersebut, diperlukan bantuan dan kerjasama masing-masing negara Asia. Diharapkan agar setiap pusat dokumentasi nasional menyokong

usaha ini dengan mengajukan surat permintaan kepada UNESCO. Pada akhir training course para peserta mengemukakan rekomendasi yang dilampirkan pada laporan ini.

Kerjasama regional dalam bidang perpustakaan dan informasi ilmiah merupakan hal yang dirasakan perlu dipupuk dan dikembangkan. Berdasarkan pemikiran ini Conference of Southeast Asia Librarians (CONSAL) yang pertama diadakan di University of Singapore pada tanggal 14 s/d 16 Agustus 1970. Sebagai pengambil prakarsa dan penyelenggara konferensi ialah Persatuan Perpustakaan Singapura dan Persatuan Perpustakaan Malaysia. Indonesia mengirimkan delegasi untuk menghadiri konferensi tsb. yaitu: Hermana: Ketua HPCI; Soejono Trimono: Biro Perpustakaan IKIP, Bandung; Lili K. Somadikarta: Fak. Sastra UI; Winarti Partaningrat: PDIN-LIPI; dan Parlinah Moedjono: Univ. Airlangga.

Konferensi telah berhasil membuat resolusi dan konstitusi sebagai berikut :

RESOLUTIONS

1. The Conference resolves that a directory of Southeast Asian libraries be compiled and periodically brought up to date.
2. Education. In view of the varied needs of Southeast Asian countries this Conference resolves (a) that basic training of librarians should be provided at national levels (b) that in-service training be provided by libraries within the region (c) that a programme of staff exchanges between Southeast Asian libraries and library school be initiated (d) that library schools in the region be encouraged to make available advanced library education and training to librarians from Southeast Asia and (e) that the project for a regional institution to provide advanced training for librarians in SEA be further explored.
3. In view of the non-existence and/or relative in effectiveness of legal deposit legislation in

Southeast Asian countries, the Conference resolves that measures be initiated at national level to formulate appropriate laws.

4. The Committee further resolves that national bibliographical committees be set up in each country and that effective liaison between these committees be maintained by the CONSAL committee in such manner as it may deem fit.

CONSTITUTION

- I. (a) The name of the organization shall be the Conference of Southeast Asian Librarians (CONSAL).
(b) Southeast Asia shall be taken to consist of those countries in the region.

II. Objectives

To hold establish conferences of Southeast Asian librarians, at least once every 3 years in order:

- (a) To establish, maintain and strengthen relations among librarians, libraries, library schools, library associations and related organizations in the region.
(b) To promote cooperation in the fields of librarianship, bibliography, documentation and related activities in the region.
(c) To cooperate with other regional or international organizations and institutions in the fields of librarianship, bibliography, documentation and related activities.

III. Participation

- (a) Delegate shall be
(i) librarians working or resident in the region,
(ii) representatives of libraries, library schools, library associations and related organizations in the region.
(b) Observers shall be those who do not qualify as delegates.

IV. CONSAL Committee

The CONSAL committee shall consist of

- (a) the Executive Board comprising the following office-bearers who shall be residents in the host country :

Chairman
Vice-Chairman
Hon. Secretary
Hon. Treasurer

- (b) two members from each participating country in the region other than the host country.

V. Functions of CONSAL Committee

The CONSAL shall:

- (a) organize the next conference, and publish its proceedings, conference.
(b) implement the resolutions adopted at the previous conference.
(c) appoint such Sub-Committees as are required.
(d) seek appropriate financial and other assistance as required.
Required to carry out the aims of CONSAL.
(e) publish a Newsletter.

VI. Location of Conference

The host country for the next Conference shall be decided by the Conference.

VII. Election

- (a) The Chairman shall be nominated by the delegate(s) of the succeeding host country and his nomination shall be endorsed by the Conference. In the event of there being more than one nominated.
(b) The other office-bearers shall be appointed by the Chairman in consultation with library association(s) of the host country.
(c) Two members from each participating country of the region shall be appointed by their respective national library association(s).

BERITA LIPI vol. 14, 1970 no 4 p 48-51

Pada tanggal 9-11 September 1970 di Bangkok diselenggarakan rapat pertama Kepala-kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi dari negara-negara ASEAN. Rapat tsb. diadakan sebagai

pelaksanaan salah satu rekomendasi dari rapat Ad-hoc Committee on Science and Technology ke-I yaitu kerjasama pertukaran informasi dalam bahasa Inggris.

Salah satu usul yang telah disetujui untuk dilaksanakan yaitu pertukaran informasi dan publikasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi antara negara-negara ASEAN akan disalurkan melalui "Clearing house" sbb.:

- a. Indonesia : Indonesia Institute of Sciences (LIPI) Jl. Teuku Chik Ditiro 43, Jakarta
- b. Malaysia : ASEAN National Secretariat of Malaysia, Ministry of Foreign Affairs, Wisma Putra, Kuala Lumpur.
- c. Philippines Division of documentation, National Institute of Science and Technology, Herran Street, Manila
- d. Singapore : Ministry of Science and Technology, Kay Siang Road, Singapore
- e. Thailand : Thailand National Documentation Centre, Phalolyothin Road, Bangkok.

Pelaksanaan survei perpustakaan ilmiah yang merupakan Proyek USAID dan PDIN-LIPI tanggal 14 Oktober- 16 Nopember 1970. Untuk tujuan itu USAID menunjuk Dr. Russell Shank, Direktur Perpustakaan Smithson Institute, Washington D.C. dan enam orang dari PDIN sejumlah 56 perpustakaan yang dikunjungi yaitu Jakarta (20), Bogor (9), Bandung (10), Denpasar (1) Medan (6) Surabaya (2), Surakarta (1), Pasuruan (1), Yogyakarta (6), sebagian besar dari perpustakaan itu telah mendapatkan bantuan buku dari USAID tahun 1968/1969.

Hasil Survei menyimpulkan sbb

Koleksi:

Pada umumnya perpustakaan lembaga-lembaga ilmiah mempunyai koleksi yang sangat kurang, terutama dalam hal majalah-majalah baru. Buku-buku untuk sebagian besar perpustakaan hanya diperoleh melalui USAID program atau sum-

bangun-sumbangan lain seperti Ford Foundation, USIS dan kedutaan-kedutaan asing.

Staf :

Selain jumlah koleksi yang kadang-kadang hanya meliputi beberapa ratus buku, kekurangan yang sangat berpengaruh ialah jumlah pustakawan-pustakawan yang berpendidikan khusus. Peningkatan berupa kursus-kursus hanya akan merupakan penjelasan sementara, karena petugasnya jarang yang mempunyai dasar pendidikan yang cukup. Maka lembaga-lembaga (termasuk NRC Bandung) perlu memikirkan penetapan pustakawan yang berijazah/qualified demi perkembangan perpustakaannya.

Perhatian Pimpinan :

Perhatian dari pimpinan lembaga masing-masing ternyata sangat berpengaruh dalam perkembangan perpustakaan, lebih-lebih lagi dalam penyediaan biaya perpustakaan. Biaya perpustakaan berkisar mulai nihil sampai beberapa juta setiap tahunnya. Mengingat bahwa hampir semua lembaga sumber keuangannya dari Pemerintah, maka perbedaan fasilitas perpustakaan yang sangat menonjol menunjukkan perbedaan minat dan perhatian pimpinan lembaga yang bersangkutan terhadap literatur ilmiah.

Penukaran :

Beberapa lembaga yang mempunyai publikasi dalam bahasa Inggris berhasil mengadakan penukaran majalah dengan lembaga-lembaga sejenis di luar negeri yang merupakan sumber literatur yang berarti untuk pembiayaan yang minimal. Ternyata dalam berbagai perpustakaan terdapat buku-buku yang tidak sesuai dengan bidangnya, yang pada umumnya diterima sebagai hadiah. Buku ini mungkin dapat dimanfaatkan lebih baik dengan menjalurnya ke lembaga-lembaga lain. Daftar buku-buku untuk penukaran atau penyaluran ini mungkin dapat diatur dan disebarluaskan oleh PDIN atau melalui majalah Himpunan Pustakawan Khusus Indonesia. Pada umumnya petugas survey ini

diterima dengan baik oleh lembaga-lembaga yang dikunjungi dan mendapat bantuan dimana diperlukan. Selain perpustakaan-perpustakaan, telah ditinjau juga kegiatan-kegiatan penelitiannya, yang banyak berhubungan dan mempengaruhi perkembangan perpustakaan.

WORKSHOP SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI ILMIAH UNTUK INDONESIA

1971 Pada tanggal 22 sampai dengan 24 Juli 1971 Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional LIPI telah mengadakan Workshop mengenai Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Ilmiah untuk Indonesia di Bandung.

Tujuan utama daripada Workshop ini ialah menghidupkan suatu jaringan dalam pengumpulan, pemrosesan dan penyebaran informasi ilmiah yang dikordinasi oleh beberapa pusat dokumentasi tingkat nasional yang masing-masing mengkhususkan diri dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu saja.

Selain itu workshop bertujuan pula membangkitkan perhatian masyarakat akan fungsi serta servis perpustakaan-perpustakaan khusus dan ilmiah. Disamping itu dibahas pula faktor-faktor yang menjadi hambatan terhadap perkembangan dokumentasi dan penyebaran informasi ilmiah serta langkah-langkah yang sebaiknya diambil.

Dalam workshop tersebut Deputy Ketua LIPI Bidang Teknologi, Ir Sumantri telah memberikan prasarana berjudul "Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Ilmiah untuk menunjang penerapan ilmu dan teknologi dalam pembangunan" dan selanjutnya telah dibahas 11 kertas-kerja yaitu :

1. Sistem jaringan dokumentasi dan informasi dalam bidang ilmu pengetahuan alam dan teknologi oleh Luwarsih Pringgoadisurjo.

2. Beberapa pandangan perihal penyebar luasan pengetahuan bidang teknologi di Indonesia.
3. Sistem jaringan dokumentasi dan informasi ilmiah bidang biologi dan pertanian, oleh Nj. P. Sahertian-Bakhoven.
4. Sistem jaringan dokumentasi dan informasi dalam bidang kedokteran dan kesehatan, oleh Nj. Parlinah Moedjono.
5. Masalah informasi ilmiah dalam ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, oleh E.K.M. Masinambow.
6. Peranan dokumentasi dan penyebaran informasi dalam industri yang sedang berkembang, oleh Wibowo Moerdoko.
7. Dokumentasi dan penyebaran informasi ilmiah dilihat dari pihak pemakai, oleh Anwas Adiwilaga.
8. Dokumentasi dan penyebaran informasi ilmiah dilihat dari pihak pemakai (berbicara tanpa kertas-kerja), oleh Masalan.
9. Katalog induk majalah: manfaat dan masalahnya.
10. Beberapa persoalan dalam usaha memasukkan publikasi ilmiah untuk penelitian, oleh Hendarta Kusbandarrum-samsi.
11. Perpustakaan depot untuk penerbitan-penerbitan Indonesia, oleh Soekarman.

Workshop yang dihadiri oleh para pustakawan, dokumentalis, ahli informasi ilmiah, wakil-wakil perpustakaan lembaga, karyawan-karyawan ilmiah dan peneliti, sarjana-sarjana, wakil-wakil penerbit dan perusahaan impor/penjualan buku, telah membahas dan berdiskusi mengenai kertas-kerja yang dikemukakan oleh masing-masing pemasaran, menghasilkan kesimpulan-kesimpulan berikut :

I. Umum.

A.1. Bahwa dirasakan perlu adanya Sistem Jaringan dokumentasi dan informasi ilmiah yang terdiri dari pusat-pusat dalam bidang khusus sebagai berikut :

1. Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi;
2. Biologi dan Pertanian

3. Kesehatan dan Kedokteran;
4. Ilmu-ilmu sosial dan Budaya.

2. Tiap Pusat supaya mengkoordinasi Unit-unit sebidang.
3. Bahwa Pusat-pusat tsb perlu dikordinasi oleh suatu badan koordinasi tingkat nasional

B. Bahwa dengan adanya jaringan itu, diharapkan dapat menanggulangi hambatan-hambatan yang memperlambat kegiatan dokumentasi dan informasi ilmiah.

Hambatan-hambatan tsb ialah

1. Arus Informasi:
 - a. Sistem jaringan itu harus mampu menyelesaikan pada tingkat nasional arus informasi dari luar ke dalam negeri dan sebaliknya;
 - b. Agar prosedur pemasukan dan pengiriman publikasi ilmiah disederhanakan.
2. Koleksi:
 - a. Dengan adanya sistem jaringan maka koleksi dari tiap Unit perlu diadakan pengkhususan;
 - b. Agar supaya menghindari terjadinya duplikasi yang tak perlu, perlu diadakan inventarisasi dari koleksi dengan cara menyusun katalog induk majalah dan buku;
3. Agar supaya kegiatan dokumentasi dan informasi ilmiah dapat terlaksana dengan baik maka harus tersedia tenaga-tenaga yang memenuhi syarat.
4. Keuangan:
 - a. Agar Pusat-pusat dan setiap Unit di dalam sistem jaringan disediakan anggaran yang cukup
 - b. Untuk pembayaran kebutuhan yang mendesak dalam memasukkan publikasi ilmiah, dianjurkan Pusat-pusat dari masing-masing bidang khusus diberikan

kelonggaran membuka rekening pada bank di luar negeri untuk jumlah yang terbatas.

5. Perundang-undangan dan Peraturan :
 - a. Disarankan agar Rancangan Undang-undang Perpustakaan yang telah diajukan sejak 1960 ditinjau kembali dan segera disahkan;
 - b. Disarankan kepada Pemerintah untuk men-sahkan dengan undang-undang pusat-pusat bibliografi yang telah ada;
 - c. Sambil menunggu disahkannya undang-undang, tiap Departemen/Lembaga Pemerintah/instansi Pemerintah supaya mengeluarkan Peraturan Menteri untuk menjamin pengumpulan dan penemuan kembali tiap dokumen.

6. Pemakai :

Oleh karena di dalam sistem jaringan dokumentasi dan informasi ilmiah faktor pemakai merupakan faktor yang menentukan pula maka dianjurkan agar:

- a. Ditingkatkan usaha-usaha meningkatkan "reading mindedness" di masyarakat;
- b. Diadakan usaha-usaha meningkatkan perhatian dan pengertian masyarakat terhadap manfaat perpustakaan.

II. Bidang Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi

1. Mengakui Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional sebagai Pusat Dokumentasi dan Informasi bidang Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi sedang Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan berfungsi sebagai Unit Khusus untuk bidang perumahan dan bangunan daerah tropika lembab.
2. Perlu dibentuk Panitia untuk mengidentifikasi bidang-bidang khusus lainnya yang perlu diawali dalam sistem jaringan dokumentasi dan informasi yang dimaksud diatas.
3. Panitia tersebut menyusun standar servis informasi ilmiah dan persyaratan minimal dari Unit-unit dalam sistem jaringan.

4. Diusulkan kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk melengkapi Buku Petunjuk Lembaga-lembaga ilmiah dengan tugas dan wewenangnya, dan mempercepat penyusunan buku Petunjuk mengenai karyawan ilmiah beserta bidang keahliannya untuk menunjang dan mempermudah tugas Pusat Dokumentasi dan Informasi.

III. Bidang Biologi dan Pertanian

1. Menyetujui bahwa Bibliotheca Bogoriensis menjadi Pusat Dokumentasi dan Informasi bidang Biologi dan Pertanian dengan tujuan :
 - a. Penggunaan informasi secara efektif untuk perkembangan agronomi (kesejahteraan manusia);
 - b. Memberi servis informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan minat pemakai.

Dengan tugas :

- a. Membina sistem jaringan perpustakaan dan dokumentasi biologi dan pertanian;
- b. Memberi nasehat mengenai kebijaksanaan penyebar-luasan informasi;
- c. Menjadi tempat penyimpanan (depot) dokumen-dokumen dalam bentuk apapun, dan bertindak sebagai "clearing house"
- d. Merupakan pusat untuk kegiatan nasional dan internasional seperti misalnya penukaran informasi dan hubungan dengan lembaga-lembaga sejenis;
- e. Menstandarisasi organisasi dan teknik perpustakaan serta dokumentasi.

IV. Kesehatan dan Kedokteran

1. Menganggap perlu adanya suatu badan yang mengkoordinasi hubungan perpustakaan bidang kesehatan dan kedokteran yang telah ada.
2. Menganggap perlu agar LIPI mengambil inisiatif membentuk "Dewan Pembina" terdiri dari wakil-wakil Departemen Kesehatan, P dan K (Consortium Medical Sciences) dan LIPI

3. Mengusulkan:

Rencana jangka pendek

- a. Melaksanakan inventarisasi semua perpustakaan bidang kesehatan dan kedokteran, dengan memperhatikan akan hasil-hasil survey Lembaga Perpustakaan Departemen P dan K, Departemen Kesehatan dan "Consortium Medical Sciences" ;
- b. Menerbitkan hasil inventaris dalambentuk Buku petunjuk umum mengenai perpustakaan kesehatan dan kedokteran di Indonesia;
- c. Mengatasi masalah yang penting seperti tenaga kerja, anggaran, fasilitas dan koleksi oleh Departemen Kesehatan, P dan K, dan LIPI.

Rencana jangka panjang

Membentuk Perpustakaan Kesehatan Nasional di bidang kesehatan dan kedokteran, yang kemudian berfungsi sebagai Pusat Dokumentasi dan Informasi dalam bidang Kesehatan dan Kedokteran.

4. Menyarankan:

- a. Pembentukan "standing committee" yang anggauta-anggautanya terdiri dari wakil-wakil Departemen Kesehatan, "Consortium Medical Sciences", dan LIPI;
- b. Penugasan "standing committee" membuat rencana induk jangka melaksanakan hal-hal yang tersebut dalam rencana jangka pendek dan panjang, dan menjajagi kemungkinan bantuan internasional dalam rangka pembangunan usaha ini.

V. Ilmu-ilmu Sosial dan Kemanusiaan

1. Menyetujui sistem jaringan dokumentasi dan informasi ilmiah sebagai berikut:
 - a. Satu Pusat yang dapat bertindak sebagai Coordinator kegiatan-kegiatan informasi ilmiah dalam bidang-bidang ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan;

- b. Unit-unit untuk bidang-bidang khusus untuk diikuti sertakan dalam jaringan;
2. Menyarankan pembentukan team ahli dengan tugas menentukan unit-unit yang dapat ditunjuk sebagai pusat. Pusat dan Unit supaya dipilih dari antara unit yang telah ada, atas dasar persyaratan
 - a. Mempunyai koleksi kuat dalam bahan-bahan informasi bidang-bidang khusus;
 - b. Mempunyai potensi tenaga-tenaga yang cakap dalam informasi ilmiah;
 - c. Mempunyai fasilitas minimum yang perlu bagi suatu unit.
3. Menganggap perlu adanya persetujuan dan kesanggupan unit-unit untuk berfungsi sebagai Pusat atau Unit informasi dalam kegiatan jaringan. Badan yang membawahi Pusat atau Unit-Unit tersebut supaya memberikan jaminan pembinaannya.
4. Meningkatkan informasi ilmiah di bidang ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan dengan jalan kerjasama antar-perpustakaan yang memungkinkan penggunaan baik koleksi umum, koleksi pemakaian terbatas, maupun koleksi pribadi. Jika dianggap perlu bagian-bagian dari koleksi tersebut supaya dapat direproduksi.
5. Meningkatkan servis informasi ilmiah dengan cara penempatan tenaga-tenaga yang mempunyai pengkhususan di bidang tertentu sebagai spesialis informasi.
- VI. Rapat ketua dan pelapor Seksi-Seksi menyetujui pembentukan "standing committee" dengan tugas mempersiapkan sebuah panitia yang akan memperhatikan pembangunan, pembinaan dan pengembangau sistem jaringan dokumentasi dan informasi ilmiah untuk Indonesia. Rapat menyetujui keanggotaan "Standing Committee" sebagai berikut

Ketua : Sumantri (LIPI)

Sekretaris : Winarti Partaningrat.(PDIN)
Anggota : A. Kartaharja (LPMB)
(Nj.) P Sahertian Bakhoven(LRKN)
E.KM. Masinambow (LRKN)
(Nj.) Jojoh Wartomo (Dep. Kes)

Berita LIPI vol 15, 1971 no. 2 p 33-37

Penyusunan Katalog Induk Majalah yang merupakan daftar Koleksi majalah ilmiah dari perpustakaan khusus di Indonesia selesai akhir tahun 1971. Katalog ini diselesaikan oleh PDIN secara manual.

Untuk merintis kemungkinan komputerisasi dalam menyusun Katalog Induk Majalah Nasional tanggal 29 September sampai Oktober 1971 PDIN mengundang DR. Hwa Wei-Loe Kepala perpustakaan Asian Institut of Technology Bangkok. Kedatangan beliau untuk memberikan saran-saran yang diperlukan dan juga mengunjungi perpustakaan di Bogor dan Bandung.

Berita LIPI vol. 16, 1972 no 1 p 68

PDIN - LIPI berhasil menerbitkan Bibliografi Penerbitan Badan-Badan Pemerintah Indonesia sejak 1950-1969. Bibliografi itu setebal 412 halaman dan memuat daftar semua penerbitan yang pernah dikeluarkan oleh semua Departemen dan Lembaga Non-Departemen, Arsip Nasional Bappenas, LIPI, BPS, BATAN, LAN.

Sebagai tindak lanjut dari hasil Workshop Sistem Jaringan di Bandung LIPI mengundang pula Dr. Horrison Bryan seorang expert dalam bidang perpustakaan ke Indonesia. Lapornya sbb.

LAPORAN DR. H. BRYAN TENTANG PERPUSTAKAAN DI INDONESIA

A. Pendahuluan.

Sebagai tindak lanjutan keputusan "Workshop sistem jaringan dokumentasi dan informasi ilmiah untuk Indonesia" yang

diselenggarakan di Bandung dari tanggal 22-24 Juli 1971, LIPI telah mengundang seorang expert dalam bidang perpustakaan ke Indonesia.

Expert yang diundang yaitu Mr. Harrison Bryan, Kepala Perpustakaan Universitas Sydney yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah apakah yang perlu diambil dalam rangka perencanaan mendirikan pusat-pusat dokumentasi dan informasi tingkat nasional.

Mr. H. Bryan telah mengunjungi berbagai perpustakaan dan Lembaga-lembaga yang berada di kota Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya, didampingi oleh Sdr. Winarti Partaningrat, Direktur Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional atau wakilnya Sdr. Luwarsih Pringgoadisurjo.

Dari hasil kunjungannya selama tiga puluh empat hari dan hasil wawancara dengan pimpinan badan pemerintah dan pimpinan lembaga-lembaga yang dikunjungi beliau telah menyusun rekomendasi untuk LIPI. Pemikiran-pemikiran dan rekomendasi Mr. H. Bryan dapat disimpulkan sbb:

B. Beberapa masalah perpustakaan di Indonesia.

1. Biaya yang disediakan untuk pembangunan servis perpustakaan dan dokumentasi adalah tidak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan untuk program research yang diharapkan dapat mengangkat tingkat hidup bangsa.
2. Koleksi terlalu terpecah-pecah dan kurang memperhatikan pengkhususan.
3. Tidak adanya anggaran rutin yang cukup untuk membeli buku dan berlangganan majalah.
4. Belum ada undang-undang wajib simpan kerja cetak. Hal ini menyulitkan perpustakaan memperoleh karya tulis terbitan Indonesia.
5. Kurangnya tenaga ahli perpustakaan.

C. Rekomendasi-rekomendasi

1. LIPI, sebagai instansi yang meminta survey ini, berusaha secepat mungkin sendiri atau

bekerja sama dengan badan-badan lain, agar supaya kebutuhan nasional dalam bidang perpustakaan dan dokumentasi memperoleh perhatian penuh dalam rangka menyusun rencana Repelita kedua.

2. Supaya LIPI menekankan kepada pimpinan perpustakaan, terutama yang ada dalam lingkungan pemerintah, supaya memberikan prioritas tertinggi dalam memberikan servis perpustakaan dan dokumentasi dan melihat pentingnya memperoleh informasi-informasi terbaru untuk kepentingan research, pendidikan dan mutu keahlian.
3. Supaya LIPI mengajukan kepada Pemerintah supaya menunjuk keempat pusat perpustakaan dan dokumentasi dalam keempat bidang yang dicakup bersama menjadi Perpustakaan Nasional.
4. LIPI menganjurkan badan-badan yang berikut di bawah ini sebagai empat pusat untuk servis Perpustakaan dan Dokumentasi Nasional.
 - A. Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional untuk bidang ilmu pengetahuan alam dan teknologi (kecuali biologi).
 - B. Bibliotheca Bogoriensis untuk bidang ilmu pertanian dan biologi.
 - C. Perpustakaan Departemen Kesehatan untuk bidang kedokteran dan ilmu kesehatan.
 - D. Perpustakaan Museum untuk bidang ilmu sosial dan kemanusiaan.
5. Dimana suatu servis perpustakaan atau dokumentasi merupakan bagian dari lembaga lain supaya diusahakan untuk mencegah agar perpustakaan jaringan ada di bawah bagian sekretariat umum atau seksi administrasi dari lembaga tersebut.
6. Status dan gaji pustakawan dalam badan research supaya ditinjau kembali sesuai dengan fasilitas yang diperoleh oleh karyawan research.
7. Dalam hal mana badan memberikan servis perpustakaan atau dokumentasi, badan tersebut harus menyediakan anggaran tahunan yang tetap untuk pembelian buku-buku dan langganan majalah-majalah.

8. LIPI mengusulkan kepada Pemerintah, ditingkat tertinggi supaya menyimpan karya cetak harus diterapkan, dimana satu eksemplar dari setiap penerbitan di Indonesia, baik diterbitkan oleh Pemerintah atau salah satu badannya, maupun diterbitkan oleh penerbit swasta; wajib menyimpannya ke Pusat Perpustakaan dan Dokumentasi Nasional.
9. LIPI mendesak kepada semua badan-badan Pemerintah dan lembaga-lembaga research agar menginstruksikan atau mengulangi instruksi; seperti yang dijalankan oleh Departemen Pertanian, semua karyawan research mendepositkan satu eksemplar dari tiap laporan mereka baik yang dikerjakan sendiri ataupun sebagai hasil bersama kepada perpustakaan yang telah ditunjuk oleh Departemen.
10. Servis Perpustakaan dan Dokumentasi Nasional dilakukan oleh suatu dewan yang dibentuk oleh Pemerintah dan memberikan tanggung jawabnya langsung kepada Menteri yang ditunjuk. Dewan tersebut seharusnya terdiri dari wakil-wakil semua lembaga dan instansi Pemerintah dan beberapa ahli perorangan yang mewakili pemakai-pemakai perpustakaan.
11. Pelaksanaan tugas servis Perpustakaan dan Dokumentasi Nasional diberikan kepada Kepala Perpustakaan Nasional, kepada siapa pustakawan-pustakawan dari keempat perpustakaan nasional dalam bidang-bidangnya memberikan laporannya terlebih dahulu.
12. Prioritas yang terpenting ditujukan supaya segera menyelesaikan gedung baru yang permanen untuk Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional.
13. Kemungkinan penggunaan teleks untuk servis perpustakaan dan dokumentasi terutama antara Bandung, Bogor dan Jakarta segera memperoleh perhatian.
14. Perpustakaan LIPI di Bandung (Perpustakaan Pusat Research Nasional) secepat mungkin diperkuat sub-senter cara menyediakan tenaga staf dan akomodasi agar perpustakaan tersebut dapat bertindak sebagai dari servis perpustakaan dan dokumentasi nasional Bandung.
15. Tahap pembangunan II dan III gedung baru untuk Bibliotheca Bogoriensis dilanjutkan tanpa mengganggu penyelesaian tingkat I.
16. Suatu panitia berkumpul secepat mungkin untuk mempelajari hubungan antara Perpustakaan Kedokteran dan Kesehatan Nasional dan jaringan perpustakaan Fakultas-fakultas Kedokteran.
17. Segera diambil tindakan dalam hal pemeliharaan koleksi yang sudah ada di Perpustakaan Museum Pusat dengan jalan melengkapi persediaan tempat yang cukup, dan membersihkan kelembaban (fumigation) koleksinya.
18. Anggaran untuk Perpustakaan Museum Pusat supaya ditambah agar perpustakaan tersebut dapat meningkatkan dan meneruskan peranannya sebagai perpustakaan dan dokumentasi masa lampau di Indonesia.
19. Fungsi tiap Pusat servis perpustakaan dan Dokumentasi Nasional adalah sebagai berikut:
 - A. Memberikan servis perpustakaan dan dokumentasi kepada Pemerintah dan rakyat Indonesia, baik dari sumber-sumbernya sendiri maupun bekerja sama dengan pusat-pusat lainnya dari jaringan servis perpustakaan dan dokumentasi nasional dengan cara mengkoordinasi, menyalurkan dan melengkapi jika perlu servis yang diberikan kepada perpustakaan dan dokumentasi yang lain di Indonesia agar supaya:
 - B. Dalam rangka memupuk koleksi :
 - (a) Melengkapi dan memelihara koleksinya, baik yang bersifat baru maupun yang dari masa lampau, baik yang masih diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan lagi, ditulis di Indonesia, oleh bangsa Indonesia atau mengenai Indonesia, dalam bidang yang dicakupnya.

- (b) Memperoleh buku-buku, majalah-majalah dan bahan-bahan lainnya dalam lapangan masing-masing terutama untuk menambah pengkhususan koleksi seperti pada waktu-waktu tertentu ditinjau oleh pusat-pusat perpustakaan dan dokumentasi di Indonesia.
- (c) Khususnya untuk majalah-majalah yang sangat mahal yang diperlukan bidang khusus seperti pada (2b) diatas, karena perlu untuk bangsa Indonesia, supaya di jauhi duplikasi pembelian atau langgan-an, atau sampai di luar kemampuan suatu perpustakaan khusus.
- (d) Terutama dalam hubungan (2b) diatas merintis dan menganjurkan dimana mungkin rasionalisasi pemupukan koleksi oleh tiap-tiap badan perpustakaan/doku-mentasi di Indonesia, untuk menghindari duplikasi seminimum mungkin dan menggunakan dana yang tersedia seefektif mungkin.

C. Dalam rangka servis bibliografi:

- (a) Memulai, memelihara dan jika mungkin, menerbitkan katalog induk koleksi milik badan-badan perpustakaan dan dokumen-tasi dalam masing-masing bidang.
- (b) Bekerjasama dengan lain Pusat servis Perpustakaan dan Dokumentasi dalam hal menyiapkan dan menerbitkan bibliografi nasional baik yang bersifat bara maupun surut, mengenai karya terbit di Indonesia oleh orang Indonesia atau mengenai Indonesia.
- (c) Bekerjasama dengan lain Pusat-pusat servis Perpustakaan dan Dokumentasi, demikian juga dengan perpustakaan dan Badan-badan Dokumentasi di Indonesia, dalam hal menyediakan servis dokumen-tasi seperti mengindeks dan mengabstrak majalah dan lain bahan, dimana servis-servis yang sudah-sudah kurang memenuhi kebutuhan Indonesia.

D. Dalam rangka servis pembaca :

- (a) Membantu perpustakaan, badan-badan lain dan peminat perseorangan memper-gunakan kekayaan koleksi.
- (b) Memperoleh literatur dari perpustakaan dan dokumentasi lain di Indonesia atau diluar demi kepentingan peminat, dan menyalurkan permintaan literatur yang diajukan perpustakaan atau badan lain.
- (c) Menerbitkan informasi yang tersedia dengan menggunakan alat informasi seperti "current awareness service" termasuk penyebaran informasi bersifat kolektif menerbitkan daftar penerimaan publikasi, bibliografi dan lain-lain informasi, baik untuk waktu-waktu tertentu maupun tak tertentu.
- (d) Menyiapkan, atau menyelenggarakan terjemahan dari literatur kedalam bahasa asing.

E. Dalam rangka nasehat dan bantuan teknik:

- (a) Bilamana perlu, menyediakan bantuan dan nasehat mengenai staf yang dibutuhkan dalam jangka pada badan-badan perpusta-kaan dan dokumentasi di Indonesia, misalnya untuk bidang perpustakaan, bibliografi dan redaksi ilmiah dan teknis.
 - (b) Memelihara hubungan baik dengan badan-badan intemasional dan regional.
 - (c) Menjalankan fimgsi-fimgsi yang lalu, jika sewaktu-waktu ditunjuk oleh pemerintah.
20. Prioritas pertama diberikan untuk menunjuk badan yang tepat untuk menjadi pusat-pusat dan jika gagasan servis Perpustakaan dan Dokumentasi Nasional dapat diterima, supaya badan tersebut disyahkan dan dilindungi dengan hukum (Rekomendasi 3, 4, 10, 11)
21. Sesudah badan dibentuk supaya pempa-ngunan Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional dan Bibliotheca Bogoriensis memperoleh prioritas, mereka dapat menyelenggarakan fungsi mereka tersebut. Hal ini memerlukan:
- A. (a) Pembangunan gedung untuk Pusat Doku-mentasi Ilmiah Nasional (Rekomendasi no. 12)

- (b) Penyelesaian gedung Bibliotheca Bogoriensis (Rekomendasi no. 15).
 - (c) Penambahan staf untuk Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional dan Bibliotheca Bogoriensis seperti dapat diperiksa dalam saran-saran bagian ini.
 - (d) Menyempurnakan persediaan buku yang sudah ada dan anggaran tahunan untuk masa yang akan datang, bagi PDIN dan B/B. (Seperti dapat diperiksa Rekomendasi no. 22).
- B. Supaya segera dipertimbangkan Rekomendasi 13 dan 14 sebagai hal yang terpenting dalam membangun kedua pusat yang akan memperoleh prioritas seperti tersebut pada (1) (a) - (d) daripada Rekomendasi ini.
- C. Supaya segera mengambil tindakan mengenai Perpustakaan Museum (Rekomendasi 17 dan 18), tetapi pembangunan selanjutnya daripada pusat untuk ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan ditunda sampai ada penyelesaian seperti tersebut pada (1) daripada Rekomendasi ini.
- D. Supaya langkah-langkah rencana pembangunan pusat kedokteran dan kesehatan ditunda sampai persoalan seperti tersebut pada Rekomendasi 16 menjadi terang.
22. Supaya bantuan dicari untuk memperoleh konsultan ahli untuk keempat bidang khusus, tetapi pertama-tama untuk bidang ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan biologi dan pertanian, untuk menilai koleksi yang ada dari pada pusat-pusat nasional kemudian memberi saran perihal pembangunan referens-referens khusus, dimana mungkin menyarankan judul-judul dan biaya yang diperlukan supaya pusat-pusat tadi benar memenuhi tugas yang diharapkan.

1972 pada tanggal 17 Maret 1972 di Delft diadakan penyerahan mikrofilm kepada LRKN-LIPI oleh KITLV. Mikrofilm tsb. merupakan bagian dari 60.000 mikrofilm yang mencakup 3,6 juta halaman penerbitan Indonesia yang

terdapat di perpustakaan Cornell University, AS. Koleksi tsb. sekarang disimpan di PDIN-LIPI *Berita LIPI vol. 16, 1972 no. 2 p. 51*

PDIN-LIPI menyelenggarakan Seminar Sistim Koordinasi dan Pemupukan Koleksi Perpustakaan Khusus pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juni 1972. Seminar ini juga merupakan tindak lanjut dari hasil Workshop di Bandung. Seminar membahas 4 tema yaitu :

- Kebijaksanaan pengadaan Koleksi Perpustakaan Khusus Unit-unit penunjang Seksi A (Ilmu pengetahuan alam dan teknologi)
- Penerapan kerjasama antar Perpustakaan
- Masalah-masalah yang menghambat pengadaan koleksi perpustakaan Khusus di Indonesia
- Masalah pembiayaan dan pelaksanaan bahan baku koleksi perpustakaan khusus

Berita LIPI vol. 16, 1972 no.3 p.52

Pada tanggal 28-29 Agustus 1972 PDIN menyelenggarakan Seminar Sistim Penyediaan Penerbitan-penerbitan Indonesia untuk kepentingan penelitian. Seminar menyimpulkan dan mengajukan saran sebagai berikut :

SEMINAR SISTIM PENYEDIAAN PENERBITAN-PENERBITAN INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN

Pada tanggal 28-29 Agustus 1972 Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional (PDIN) telah mengadakan Seminar Sistim Penyediaan Penerbitan-Penerbitan Indonesia untuk Kepentingan Penelitian.

Direktur PDIN, Winarti Partaningrat dalam pidato pembukaannya menyatakan bahwa seminar ini merupakan rangkaian seminar yang diadakan oleh PDIN sebagai usaha untuk mengatasi rintangan yang menghambat kelancaran pelayanan dokumentasi dan informasi ilmiah.

Setelah mendengarkan pidato pengarahan dari Ketua LIPI, Prof. Sarwono Prawirohardjo dan pembacaan kertas kerja dari Sdr. Luwarsih Pringoadisuryo serta mendengarkan diskusi

dari para peserta maka Seminar mengambil kesimpulan dan mengajukan saran sebagai berikut

I. Umum

1. Dalam rangka kegiatan penelitian yang semakin meningkat, informasi ilmiah memegang peranan penting untuk :
 - a. Menghindarkan duplikasi dalam penelitian,
 - b. Menghindarkan pengulangan dari pada pekerjaan yang pernah dilaksanakan sebelumnya,
 - c. Menyempurnakan hasil penelitian yang terdahulu,
 - d. Mempersingkat waktu tercapainya hasil/penemuan yang diharapkan.

Semua ini dapat merupakan penghematan waktu, tenaga dan biaya.

2. Informasi mengembangkan komunikasi antar-instansi pusat dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat.
3. Informasi memberikan dasar bagi pimpinan dalam mengambil keputusan yang bijaksana dan tepat.

II. Masalah-masalah

Dewasa ini dirasakan adanya kesukaran-kesukaran :

1. Belum adanya tempat pusat penyimpanan yang jelas bagi setiap hasil penerbitan pemerintah yang berupa karya cetak, stensil, film rekaman, dll.
2. Belum adanya tempat yang jelas menyebabkan kesukaran dalam hal penelusuran dan memperoleh hasil penerbitan tsb.
3. Belum adanya bibliografi yang sistimatis dan terbit teratur yang dapat dipergunakan sebagai alat informasi dan alat mengetahui penerbitan instansi yang bersangkutan.
4. Belum adanya keseragaman dalam menerbitkan penerbitan pemerintah.
5. Belum adanya pengarah sasaran yang tegas dari penerbitan-penerbitan pemerintah.
6. Belum adanya penyebaran yang sistematis dan teratur sehingga dapat mencapai sarannya.

III. ANALISA DARI MASALAH

1. Semua jenis penerbitan pemerintah dalam bentuk cetak apapun mempunyai nilai sejarah, oleh sebab itu perlu dipelihara.
2. Jumlah penerbitan yang kian bertambah besar, memerlukan kebijaksanaan sistim nasional untuk menegaskan penyimpanannya dan juga kemungkinan penggunaannya bagi setiap orang yang memerlukannya, terutama bagi warga negara Indonesia.
3. Perlu kebijaksanaan nasional dalam sistim penyebarannya.

IV. PEMECAHAN MASALAH

1. Perundangan

- a. Perlunya peraturan perundangan yang mengatur pembentukan perpustakaan nasional serta pusat-pusat dokumentasi dan informasi ilmiah nasional.
- b. Perlunya peraturan perundangan yang mengatur wajib simpan karya cetak pada perpustakaan nasional serta pusat-pusat dokumentasi dan informasi ilmiah nasional.
- c. Sambil menunggu peraturan perundangan tersebut pada a dan b, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang telah ada, dalam melaksanakan Peraturan Presiden no. 20, 1961 tentang "Tugas

Kewajiban dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan dalam Lingkungan Pemerintah", disarankan agar setiap pimpinan departemen/lembaga-lembaga non-departemen mengeluarkan instruksi/surat keputusan tentang kewajiban setiap instansi dalam lingkungannya untuk menyampaikan dan menyimpan semua penerbitannya kepada perpustakaan/unit dokumentasi yang ditujukannya, seperti halnya, Instruksi Menteri Pertanian no. 43/Kpts/Um/2/1969, tanggal 10 Februari 1969; Surat Keputusan Menteri Kesehatan no. 552/X/AU/Perp/BV/69 tanggal 8 Oktober 1969 dan Surat Keputusan Ketua LIPI no. 91/KEP/H.3/70 tanggal 22 Mei 1970.

Berita LIPI vol. 16, 1972 no. 4 p.45-48

2. Pembagian tugas

- a. Setiap departemen/lembaga non-departemen paling sedikit harus memiliki koleksi dari penerbitan departemen/lembaga non-departemen dan bagian-bagian yang berada di dalam lingkungan masing-masing yang dikemudian hari dapat diserahkan satu copy kepada perpustakaan nasional yang harus dibentuk.
- b. Setiap perpustakaan/unit dokumentasi departemen/lembaga non-departemen masing-masing berkewajiban menerbitkan daftar pustaka/bibliografi penerbitan secara sistematis, sekurang-kurangnya sekali setahun.
- c. Setiap pusat dokumentasi dan informasi ilmiah nasional secara selektif sesuai dengan bidangnya masing-masing mendapatkan penerbitan-penerbitan dari suatu unit departemen/lembaga nondepartemen, yang telah ditunjuk secara resmi menyebarkan penerbitan-penerbitan.
- d. Setiap pusat dokumentasi dan informasi ilmiah nasional wajib menerbitkan bibliografi dalam masing-masing bidang.
- e. Kantor Bibliografi Nasional menerbitkan secara teratur suatu bibliografi nasional dengan memanfaatkan bibliografi yang diterbitkan oleh setiap departemen/lembaga non-departemen.
- f. Harus diletakkan sistem nasional pelayanan dan peminjaman melalui perpustakaan dan sistem distribusi dengan cara pertukaran/pengjualan penerbitan-penerbitan departemen/lembaga/nondepartemen.
- g. Perlunya adanya hubungan kerja yang erat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam bidang penyediaan penerbitan pemerintah antara departemen-departemen dan lembaga-lembaga nondepartemen.
- h. Pada setiap perpustakaan/unit dokumentasi perlu disediakan anggaran tetap yang cukup dan memadai untuk menyelenggarakan tugas-tugas pengumpulan, memproses dan pemeliharaan penerbit tersebut.

- i. Disarankan pembentukan panitia nasional yang bertugas menampung persoalan-persoalan dalam program-program pembinaan, pembangunan dan perkembangan bidang-bidang dokumentasi dan informasi ilmiah seperti yang telah disarankan pada Workshop Sistem Jaringan Dokumentasi di Bandung, tanggal 22 - 24 Juli 1971.

Pertemuan kepala-kepala Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Negara-negara ASEAN ke-2 di Bangkok tanggal 15-17 Nopember 1972 diputuskan bahwa setiap negara ASEAN diwajibkan dan menerbitkan bibliografi disertai abstrak dalam bidang: Malaysia: food protein; Singapore: water resources and national development; Indonesia: soya bean processing and utilization; Filipina: corrosion of metals humid tropics; Muang Thai: diusulkan pencemaran air.

Berita LIPI vol. 17 1973 no.1 p.64,65

1973 Tanggal 20-21 Febuari 1973 diadakan Lokakarya Otomatisasi Penerbitan Katalog Induk Majalah. Sebagai tindak lanjut Seminar Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Ilmiah untuk Indonesia bulan Juli 1971, maka dengan Surat Keputusan Ketua LIPI no. 196/Kep/y.1/73 tanggal 1 September 1973 diangkat menjadi Pimpinan Proyek Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmu-ilmu Sosial (PDIS).

Drs. Abdurrachman Surjomiharjo. Seperti juga halnya pada tiga Pusat Nasional yang lain, PDIS dalam melakukan kegiatannya bekerjasama dengan perpustakaan-perpustakaan penunjang yang bergerak dalam bidang-bidang ilmu sosial dan kemanusiaan. Untuk sementara PDIS beralamat di Jalan Raden Saleh 43, Jakarta
Berita LIPI vol. 18, 1974 no.2 p.35-36

1974 PDIN-LIPI menerbitkan majalah baru "Baca" sebagai sarana komunikasi singkat antara petugas dan pemakai informasi bidang ilmu dan teknologi. Nomor pertamanya diterbitkan bulan Febuari 1974. International Serials Data System

(ISDS) dibentuk dalam rangka program United Nations Information System (UNISIST). ISDS terdiri dari pusat International (IC), Pusat Nasional dan Regional. Pusat International ISDS bertempat di Paris. Salah satu tugasnya yaitu mengelola International Standard Serial Number (ISSN).

Tiap penerbitan berseri akan memperoleh kode ISSN yang ditunjuk oleh International Organization for Standardization (ISO).

PDIN-LIPI ditunjuk sebagai pusat nasional melaporkan masukan kepada Pusat ISDS, Paris sejak 1976.

Berita LIPI vol. 18, 1974 no.2 p. 42-43

Pada tanggal 2 Desember 1974 PDIN pindah alamat dari Jalan Raden Saleh no. 43, Jakarta Pusat ke gedung yang baru di Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Layanan yang diberikan tetap seperti biasanya yaitu layanan perpustakaan, layanan dokumentasi dan reproduksi.

Bertempat di gedung PDIN-LIPI Jalan Jend. Gatot Subroto pada tanggal 16 Desember 1974 dilangsungkan upacara pelantikan Komisi Bidang Perpustakaan dan Dokumentasi oleh Deputy Ketua LIPI bidang Teknologi Ir. Sumantri. Tugas dari Komisi ialah antara lain mengadakan inventarisasi standar-standar dan kegiatan standarisasi dalam bidang perpustakaan dan dokumentasi, mempelajari kebutuhan akan standarisasi dalam bidang tsb, beserta urutan prioritasnya; menentukan prioritas dan garis-garis pelaksanaan program kerja standarisasi dalam bidang istilah, lambang perpustakaan dan dokumentasi dalam segi teknis dan administrasi penerbitan, reproduksi mekanisasi dan otomasi; mengusulkan dan mempersiapkan pembentukan panitia Teknis/Sub Panitia Teknis dan setelah terbentuk mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatannya. Sebagai Ketua: Luwarsih Pringgoadisurjo. (PDIN); Wakil: Candra P. Mualim (LPMB-PUTL); Sekretaris: Kosasih dan

Sekretaris II: Andrini Martono; Anggota: Suwarto (BB); Sunardi Ronowiswojo (BPP-Dep.P&K); Ayip Rosidi (IKAPI).

Berita LIPI vol. 19, 1975 no. 1 p.43-44

1975 Penyelenggaraan pertemuan mengenai Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Ilmiah berlangsung di gedung PDIN-LIPI Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta yaitu pertama berlangsung pada tanggal 27 Februari 1975 pertemuan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi bidang Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi. Pada pertemuan ini dibahas masalah hambatan-hambatan penyaluran informasi kepada para pemakai dalam bidang ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Pertemuan kedua berlangsung pada tanggal 28 Februari 1975 yaitu pertemuan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi bidang Ilmu-ilmu Sosial dan Kemanusiaan. Pada pertemuan ini dibicarakan usaha-usaha memperkuat koordinasi sistem jaringan dokumentasi dan informasi bidang-bidang ilmu sosial dan kemanusiaan, hambatan-hambatan penyaluran informasi. Pada pertemuan pertama bertindak sebagai penyelenggara PDIN-LIPI dan pertemuan kedua sebagai penyelenggara PDIS-LIPI.

Berita LIPI vol. 19, 1975 no.2 p.48-49

PERINGATAN DASAWARSA PDIN-LIPI

Pada tanggal 31 Juli 1975 Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional (PDIN) genap berusia sepuluh tahun. PDIN didirikan pada tanggal 1 Juni 1965 dengan Surat Keputusan Menteri Research Nasional (pada waktu itu) No. 107/Kpts/Str/65 yang kemudian baru diresmikan pemakaiannya tanggal 31 Juli 1965. Sekarang PDIN telah menempati gedungnya yang resmi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta yang semula menempati gedung sementara di Jalan Raden Saleh 43, Jakarta.

Tugas utama PDIN ialah memberikan pelayanan akan kebutuhan bahan-bahan bacaan keperluan penelitian baik di lembaga-lembaga penelitian di lingkungan LIPI maupun di luar lingkungan

LIPI. Dalam jangka waktu sepuluh tahun itu telah banyak kegiatan yang telah di kerjakan oleh PDIN sebagai usaha untuk meningkatkan mutu pelayanan. Sebagai contoh, untuk menyebutkan salah satu kegiatannya itu ialah: "Lokakarya Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Ilmiah untuk Indonesia" yang diadakan di Bandung.

Lokakarya itu berakhir dengan keputusan bahwa untuk tingkat nasional perlu dibentuk empat Pusat Dokumentasi sebagai berikut :

1. Bibliotheca Bogoriensis, melayani bi-dang biologi dan pertanian.
2. PDIN, melayani bidang ilmu dan teknologi.
3. Perpustakaan Departemen Kesehatan, melayani bidang kesehatan dan kedokteran.
4. Pusat Dokumentasi Ilmu Sosial (PDIS), melayani bidang ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan.

Disamping fungsinya sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi yang melakukan kegiatan penelusuran literatur. PDIN berfungsi juga sebagai Koordinator Sistem Nasional Jaringan Dokumentasi dan Informasi yang melakukan kegiatan penyusun direktori dan katalog induk majalah.

Partisipasi PDIN dalam tingkat regional disalurkan melalui ASEAN, FID/CAO dan CONSAL.

Dalam rangka ASEAN diadakan pertemuan berkala dari masing-masing kepala-kepala pusat dokumentasi dan informasi nasional masing-masing negara.

Dalam Conference of Southeast Asian Librarians (CONSAL) yaitu konferensi se Asia Tenggara yang diadakan setiap tiga tahun, PDIN juga ikut mengambil bagian. Dengan berbagai badan internasional lain di Muangthai, Inggris, Australia dsb. PDIN banyak mengadakan hubungan.

Dalam rangka peringatan dasawarsa PDIN tahun 1975 ini telah diadakan serangkaian ceramah

ilmiah di antaranya dari Dr. H. Grunewald seorang Libterary Director pada Weinheim's Gesellschaft Deutscher dengan judul "Why Scientists Write". Selain itu juga diadakan "open house" untuk mereka yang berminat mengenal pelayanan PDIN dan pemutaran film mengenai perpustakaan.

PEMERINTAH INGGERIS MENGHADIAHKAN BUKU-BUKU STANDAR KEPADA PDIN-LIPI

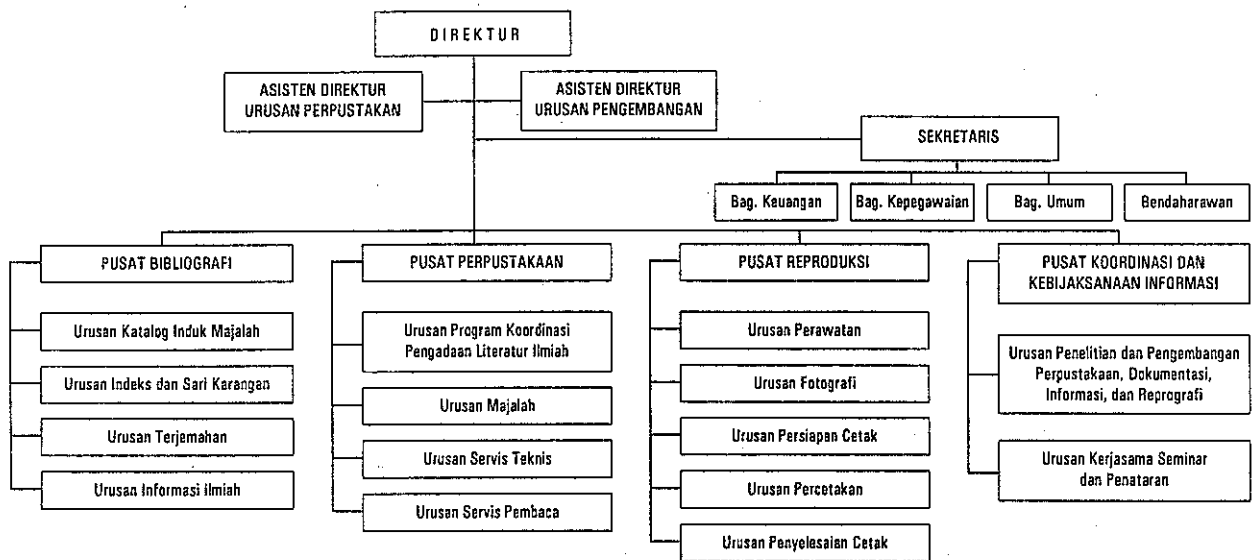
Duta Besar Inggris di Indonesia Jhon Ford pada tanggal 4 Agustus 1975 telah menyerahkan secara simbolis buku-buku yang dihadiahkan pemerintah Inggris kepada pemerintah Indonesia. Buku-buku yang dihadiahkan itu berupa satu set buku-buku standar yang bernilai sepuluh ribu poundsterling.

Penyerahan dilakukan kepada Ketua LIPI Prof. Dr. Ir. Bachtiar Rifai di gedung PDIN-LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, bertepatan dengan hari ulang tahun ke 10 lembaga ini.

Buku-buku yang dihadiahkan itu terdiri dari 6.000 buku yang sebelumnya disimpan di gedung British Council, Jakarta.

Selanjutnya berdasarkan surat Keputusan Ketua LIPI no. 170/Kep./D.5/75, mulai tanggal 13 Agustus 1975. Ir. Ny. Sriati Djafri M.M.E telah diangkat sebagai Kepala Pusat Bibliografi Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional LIPI.

Mengingat Struktur Organisasi Lembaga-lembaga Penelitian dalam lingkungan LIPI yang ditetapkan dengan SK Ketua LIPI no. 227/Kep.D5/1968 tanggal 20 Nopember 1968 sudah tidak dapat menampung program kerjanya maka perlu ada struktur baru yang diperinci dan disesuaikan. Oleh sebab itu sambil menunggu persetujuan MENPAN, Ketua LIPI menetapkan perincian dan penyesuaian unti-unti kerja dalam lingkungan dalam lingkungan LIPI melalui Surat Keputusan no.245B/Kep/D.5/75 tanggal 15 Nopember 1975. Dalam hal tersebut diatas struktur organisasi PDIN pun mengalami perubahan sebagai tercantum dibawah ini :



Konperensi Pustakawan se-Asia Tenggara (Conference of Southeast Asian Librarians = CONCAL III) berlangsung di Jakarta dari tanggal 1 s/d 5 Desember 1975. Konperensi ini diselenggarakan oleh Ikatan Pustakawan Kesehatan Depkes dan Pusat Pembinaan Perpustakaan, Departemen P&K. Penyelenggaraan Konperensi ini bersamaan dengan konperensi SARBICA (Southeast Asian Re-

gional Branch of the International Council on Archives). CONCAL III dan konperensi SARBICA melangsungkan "Joint session") pada hari pertama yaitu mengenai Microfilming Services in Southeast Asia. Tema dari konperensi ialah : Integrated Library and Documentation Services.

Berita LIPI vol. 20, 1976 no. 1 p. 76-77

---00---